

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana adalah rangkaian kejadian atau peristiwa yang dapat mengganggu ketenangan, membahayakan jiwa, menimbulkan ketakutan juga mengancam kesejahteraan masyarakat. Dampak dari terjadinya suatu bencana dapat mempengaruhi hidup masyarakat bahkan memungkinkan adanya korban jiwa. Seperti yang dijelaskan (UNISDR, 2009), bencana adalah sebuah gangguan serius terhadap berfungsinya sebuah komunitas atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian dan dampak yang meluas terhadap manusia, materi, ekonomi dan lingkungan, yang melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak tersebut untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri.

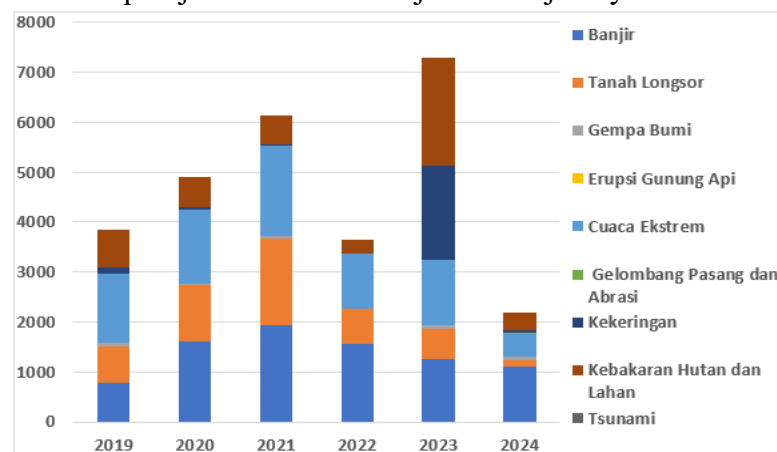
Bencana atau dalam bahasa Inggris disebut dengan “*disaster*” sering dimaknai sebagai sesuatu peristiwa yang mengancam kehidupan manusia, baik yang disebabkan oleh faktor alam, manusia, maupun non-alam (Anggaini, 2023). Adapun menurut peraturan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007, bencana di Indonesia dikelompokkan kedalam tiga tipe, yaitu bencana non-alam, bencana sosial dan bencana alam. Bencana non-alam yaitu bencana yang terjadi di luar faktor alam, biasanya dampak dari perilaku atau kegiatan manusia. Bencana sosial yaitu bencana yang diakibatkan oleh manusia yang merupakan makhluk sosial. Bencana alam yaitu bencana yang terjadi karena alam atau segala sesuatu yang berhubungan dengan alam.

Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi rawan. Negara ini merupakan gabungan dari banyak pulau, termasuk beberapa yang tidak memiliki penduduk. Berlokasi di kawasan Asia Tenggara antara Samudra Pasifik dan Hindia. menurut (Amri, 2016) “Dari segi ilmu kebumiharian, Indonesia memang merupakan daerah yang sangat menarik. Selain memiliki wilayah paparan benua yang luas (Paparan Sunda dan Paparan Sahul), juga memiliki pegunungan lipatan tertinggi di daerah tropika dan bersalju abadi (Pegunungan Tengah Papua). Selain itu satu-satunya di dunia terdapat laut antar pulau yang sangat dalam yaitu Laut Banda (lebih dari 5.000 meter), dan laut sangat dalam. Kondisi tersebut merupakan bagian dari hasil dari proses pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia dan lempeng Pasifik”. Letak ini tidak hanya memberikan keuntungan dalam hal perdagangan dan hubungan internasional, tapi juga berpengaruh besar terhadap potensi bencana alam yang akan dihadapi nantinya.

Iklim di Indonesia sangat dipengaruhi oleh lokasi dan karakteristik geografis yang membentang antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia memiliki 3 pola iklim dasar: monsun, khatulistiwa, dan sistem iklim lokal yang menyebabkan perbedaan pola curah hujan yang dramatis (Herlianto, 2017). Secara geografis, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu kemarau dan hujan. Keadaan ini berkontribusi pada intensitas hujan yang besar, yang seringkali menjadi salah satu aspek penyebab terjadinya bencana. Risiko terjadinya bencana yang ada di Indonesia juga bervariasi setiap tahunnya, mengalami kenaikan atau penurunan tergantung pada perubahan yang terjadi pada alam. Terdapat lebih dari 5 ancaman yang dibagi menjadi bencana geologi berdasarkan oleh aktivitas bumi

yang muncul, hidrometeorologi berdasar faktor cuaca dan bencana antropogenik berdasar aktivitas manusia.

Gambar 1.1 Kejadian Bencana di Indonesia tahun 2019-2024 berdasarkan kelompok jenis bencana dan jumlah terjadinya bencana.

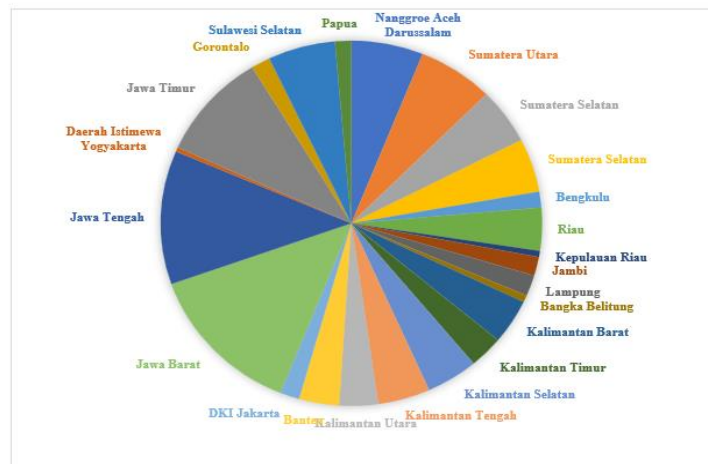


Sumber: <https://gis.bnpb.go.id/> Maret, 2025

Data diatas mencatat kejadian bencana di Indonesia dalam lima tahun terakhir berdasarkan kelompok jenis bencana dan jumlah terjadinya bencana setiap tahunnya. Dapat dilihat bahwa kejadian bencana mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup drastis di beberapa tahun. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah daerah yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi. Dalam Undang-Undang juga dijelaskan bahwa bencana disebabkan oleh serangkaian peristiwa alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Selaras dengan data yang tercantum selama lima tahun terakhir, cuaca ekstrem dan Banjir merupakan jenis bencana yang paling kerap melanda Indonesia. Dua bencana alam tersebut saling berkesinambungan. Dipengaruhi dari

posisi Indonesia, iklim, dan arah angin menjadi pengaruh utama terjadinya cuaca ekstrem yang akhirnya berujung ke bencana banjir.

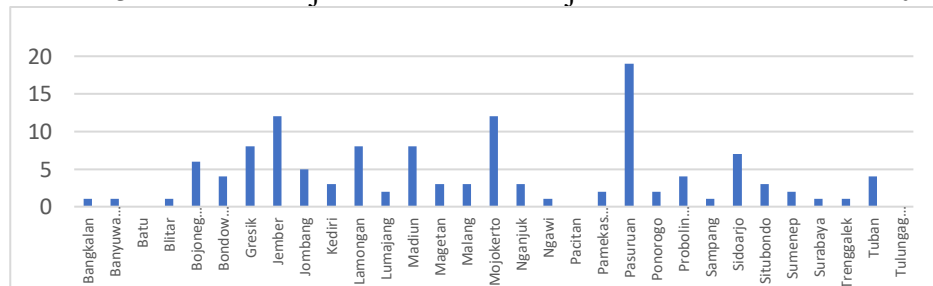
Gambar 1.2 Kejadian Bencana Banjir di Indonesia berdasarkan setiap Provinsi tahun 2019-2024



Sumber: <https://gis.bnpb.go.id/> Maret, 2025

Pada data diatas terdapat informasi yang menunjukkan kejadian bencana banjir berdasarkan tiap-tiap Provinsi di Indonesia. Dalam lima tahun terkahir Jawa Timur menjadi provinsi yang paling sering terjadi banjir ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namun dalam satu tahun terakhir yaitu tahun 2024, Jawa Timur menjadi daerah dengan angka banjir tertinggi di pulau jawa. Data dari DIBI BNPB menunjukkan bahwa Jawa Timur mencapai angka 100 untuk kejadian banjir, sedangkan Jawa Barat dengan angka 94 dan disusul dengan Jawa Tengah dengan angka 81 kejadian.

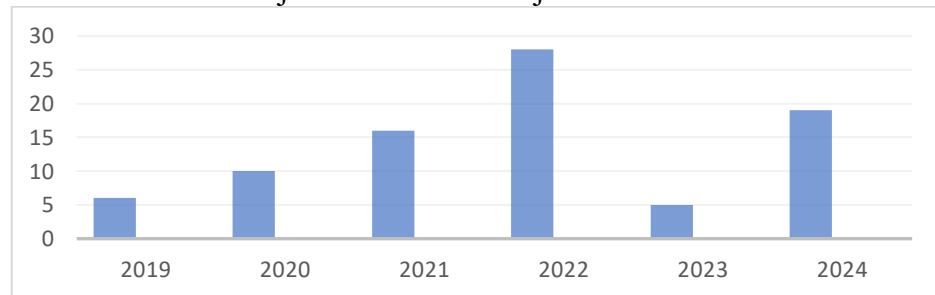
Gambar 1.3 Frekuensi Kejadian Bencana Banjir di Jawa Timur Tahun 2024



Sumber: <https://gis.bnpb.go.id/> Maret, 2025

Dari banyaknya wilayah di Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan merupakan wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap bencana banjir akibat kondisi geografisnya yang didominasi dataran rendah aluvial dan dilintasi oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Rejoso serta Kedunglarangan. Fenomena ini diperparah oleh perubahan iklim yang meningkatkan intensitas curah hujan hingga lebih dari 500 mm/hari, sedimentasi sungai, dan alih fungsi lahan resapan menjadi permukiman. Frekuensi bencana banjir di Kabupaten Pasuruan juga dapat dikatakan paling sering dibanding daerah lain. Pada tahun 2024 kemarin terjadi sekitar 19 kejadian bencana banjir yang tersebar di banyak titik di daerah pasuruan.

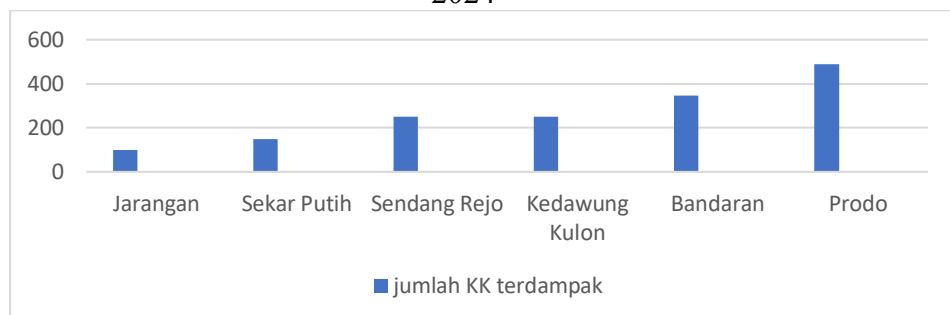
Gambar 1.4 Frekuensi Kejadian Bencana Banjir di Pasuruan Tahun 2019-2024



Sumber: <https://gis.bnpb.go.id/> Maret, 2025

Banjir di pasuruan terjadi di setiap tahunnya, khususnya di beberapa titik yang memiliki risiko, durasi dan frekuensi yang hampir sama setiap tahunnya.

Gambar 1.5 Frekuensi Kejadian Bencana Banjir di Wilayah Pasuruan Tahun 2024



Sumber: <https://gis.bnpb.go.id/> Maret, 2025

Berdasarkan data diatas, wilayah di pasuruan yang mengalami banjir yang cukup parah dan terjadi setiap tahun adalah Desa Prodo dengan jumlah terdampak 490 KK di Kecamatan Winongan. Desa Prodo Kecamatan Winongan selalu mengalami banjir dengan berbagai sebab, entah luapan dari daerah lain maupun karena potensi dari letak geografis daerah itu sendiri.

Bencana pada umumnya terjadi secara mendadak dan dapat menimbulkan dampak yang merugikan. Masyarakat yang mengalami dan terkena bencana perlu melakukan tindakan untuk menghadapi dan menanggulangnya. Upaya ini dikenal dengan penanggulangan bencana atau *disaster management*. Penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus meliputi sebelum, pada saat, dan setelah bencana terjadi. (Rosmini, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Adapun Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan sistem mitigasi bencana di Negara Indonesia. Kabupaten Pasuruan telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur tiga fase manajemen bencana: pra bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana. Pra Bencana merupakan tahapan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana, ketika tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana. Tanggap darurat merupakan tahapan yang diterapkan dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana. Sedangkan pasca-bencana merupakan tahapan yang dijalankan setelah terjadinya bencana. Mitigasi pra-

bencana merupakan fase krusial dalam menghadapi bencana, terutama banjir untuk mengurangi risiko dan dampak bencana banjir. Sebagai wilayah rawan bencana banjir, kabupaten pasuruan juga memiliki peraturan terkait bencana banjir, yaitu Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kontingensi Bencana Banjir. Peraturan tersebut juga menekankan pentingnya mitigasi pra-bencana melalui kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Mitigasi pra-bencana banjir sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat. Langkah-langkah mitigasi seperti normalisasi sungai perbaikan drainase dan saluran air sangat diperlukan untuk mengurangi resiko banjir di Desa Prodo (Hakim, 2024).

Penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi bahan rujukan peneliti dalam menelaah mengenai Mitigasi Bencana Banjir Daerah (Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan yang di teliti oleh Ayun Sukma Mariyana (2015). Penelitian ini memiliki hasil bahwa mitigasi terhadap bencana banjir di Kabupaten Pasuruan sudah dilakukan di Semua daerah yang memiliki potensi tinggi terkena banjir, yang dilakukan oleh BPBD. Upaya ini berhasil menurunkan risiko bencana di daerah-daerah tersebut. Faktor pendukung utama adalah partisipasi berbagai instansi dan organisasi masyarakat serta dukungan dana. Namun, masih ada hambatan seperti keterbatasan kapasitas sarana dan prasarana, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang penanggulangan bencana.

Berdasarkan penjelasan diatas, hingga kini masih belum dilakukan analisa mengenai Implementasi Kebijakan Mitigasi Pra-Bencana Banjir di Desa Prodo

Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan berdasarkan Analisis Perda Nomor 4 Tahun 2011. Serta, didasari oleh kondisi Desa Prodo yang merupakan wilayah rawan banjir akibat letaknya yang berada di pertemuan dua sungai besar, yaitu Sungai Rejoso dan sungai dari wilayah atas seperti Lumbang. Banjir tahunan yang rutin melanda desa ini menyebabkan dampak signifikan terhadap pemukiman dan aktivitas masyarakat. Oleh sebab itu, peneliti menetapkan judul penelitian yaitu **“Implementasi Kebijakan Mitigasi Pra-Bencana Banjir di Desa Prodo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Mitigasi Pra-Bencana Banjir di Desa Prodo Kabupaten Pasuruan?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai Implementasi Kebijakan Mitigasi Pra-Bencana Banjir di Desa Prodo Kabupaten Pasuruan berdasarkan Analisis Perda Nomor 4 Tahun 2011.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan memperluas pemahaman mengenai Implementasi Kebijakan Mitigasi Pra-Bencana Banjir di Desa Prodo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan berdasarkan Analisis Perda Nomor 4 Tahun 2011. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan sebagai bagian dari penyusunan skripsi

guna memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

2. Manfaat secara Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan Departemen Ilmu Administrasi Publik. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi studi-studi berikutnya yang membahas tentang Implementasi Kebijakan Mitigasi Pra-Bencana Banjir di Desa Prodo Kabupaten Pasuruan berdasarkan Analisis Perda Nomor 4 Tahun 2011.

3. Manfaat secara Praktis.

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta rekomendasi bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan kepada BPBD, Pemerintah Desa Prodo, relawan lokal dan masyarakat mengenai Implementasi Kebijakan Mitigasi Pra-Bencana Banjir di Desa Prodo Kabupaten Pasuruan berdasarkan Analisis Perda Nomor 4 Tahun 2011.